



Peran Perempuan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2017-2021

Patimah Zahra^{1,*} dan Hardius Usman²

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, Jambi, Indonesia

²Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Indonesia

Abstract

Indonesia is still grappling with poverty issues, both at the national and regional levels. The trend shows a downward movement, although the pace of decline tends to be slow and has not been able to meet the poverty target set forth in the RPJMN 2020-2024. Thus, there is a need for innovation in poverty alleviation policies. One such approach is maximizing the role of women. When women participate in productive economic activities, the welfare of their families increases, which can reduce the poverty rate in aggregate. Therefore, this study aims to analyze the influence of variables representing the role of women on poverty levels in Indonesia from 2017 to 2021. The method used is panel data regression with the FEM selected model and the FGLS-SUR estimation method. The results show that women's pure participation rate, women's life expectancy, the percentage of households with female heads, women's adjusted per capita expenditure, women's average wages, and women's labor force participation rate have a negative and significant effect on poverty levels, while women's open unemployment rate has a positive and significant effect on poverty levels. Meanwhile, women's literacy rate has a negative but insignificant effect on poverty levels.

Keywords: Poverty, Women, and Panel Data Regression.

JEL Classification: J16, I32, and C23.

<https://doi.org/10.14710/jdep.7.1.33-49>



[This is an open-access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

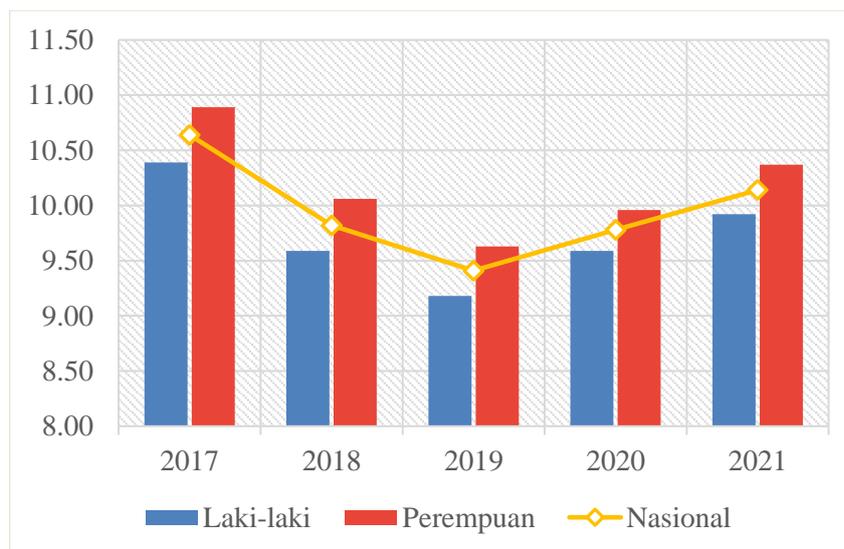
Pendahuluan

Salah satu masalah yang bersifat global dan dialami oleh seluruh negara di dunia adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan dipandang sebagai 'penyakit' sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris (Prawoto, 2009). Tingkat kemiskinan yang tinggi mengisyaratkan bahwa belum terpenuhinya hak-hak dasar manusia karena kemiskinan tidak hanya mengenai kekurangan uang, tetapi juga merupakan bentuk kondisi di mana tidak terpenuhinya kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Prakarsa, 2020). Fenomena kemiskinan ini harus mendapat perhatian karena kemiskinan dinilai dapat

*Corresponding Author: Patimah Zahra, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, Jambi, Indonesia, patimah.zahra@bps.go.id

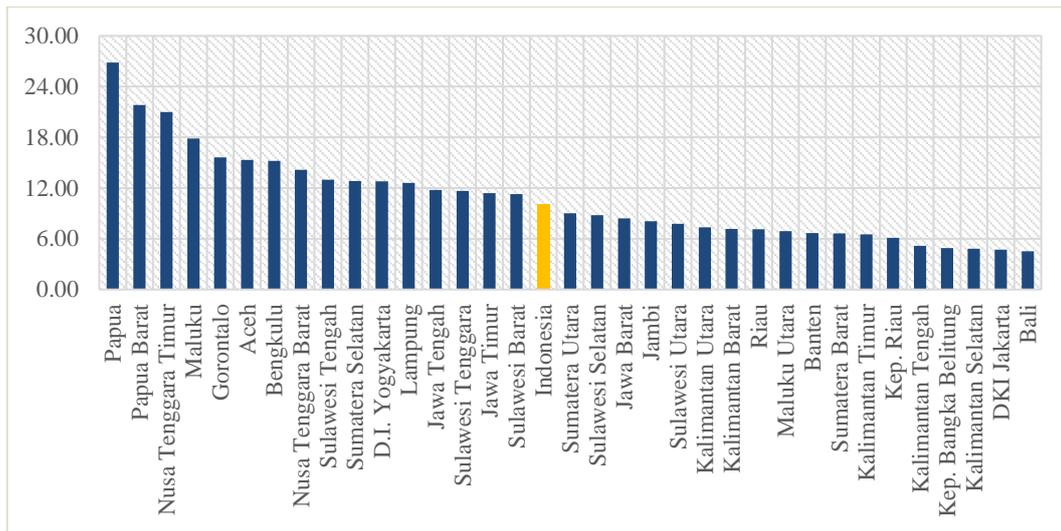
menimbulkan berbagai masalah lain seperti kejahatan sosial dan multiplier efek lainnya (Suharianto & Lubis, 2022). Hal tersebut yang mendorong kemiskinan dijadikan sebagai tujuan pertama pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun dengan salah satu targetnya adalah mengentaskan kemiskinan ekstrim di tahun 2030 dan mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan”. Sebagai bentuk partisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia turut berkomitmen dan menunjukkan keseriusannya dengan menempatkan pengentasan kemiskinan pada satu di antara sasaran utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk sasaran makro pembangunan, yakni mengharapkan adanya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0-7,0 persen di tahun 2024.

World Population Review mengemukakan bahwa Indonesia berada di posisi ke-73 dari 100 negara termiskin di dunia. Sementara itu, pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia memiliki tren yang menurun, meskipun laju penurunannya cenderung lambat. Akan tetapi, tingkat kemiskinan di Indonesia kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Bahkan, di tahun 2021, angkanya menyentuh 10,14 persen dengan jumlah penduduk sebanyak 27,54 juta jiwa yang tergolong sebagai penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut ‘menjauh’ dari target pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Fenomena pandemi Covid-19 diduga menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan Indonesia di tahun 2021 (Setyadi & Indriyani, 2021).



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 2017 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



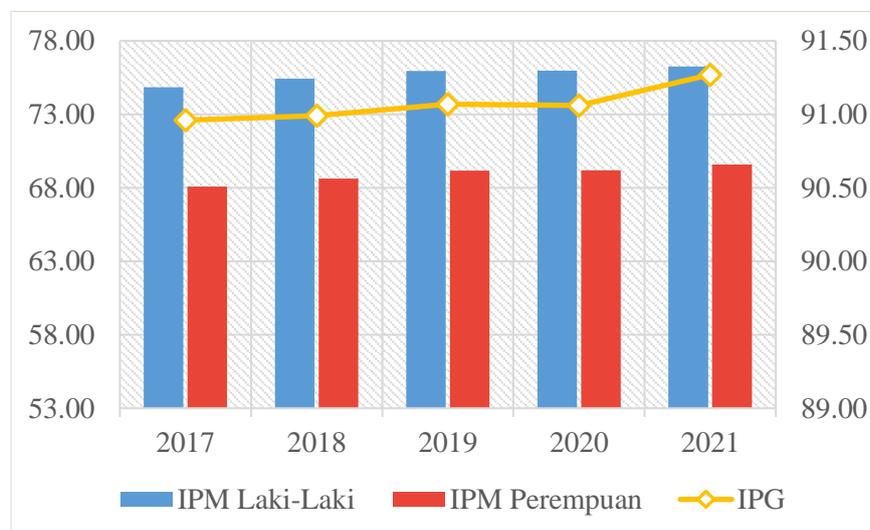
Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia, 2021
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Keadaan kemiskinan antar provinsi di Indonesia cukup bervariasi. Berdasarkan Gambar 2, provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas kemiskinan nasional dapat dikategorikan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Pada tahun 2021, provinsi-provinsi yang mempunyai kemiskinan relatif tinggi pada tahun 2021 adalah Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Lampung, D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Aceh, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Pembangunan di seluruh wilayah yang belum merata menjadi salah satu penyebab masih adanya permasalahan disparitas kemiskinan antar provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang sejalan dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia (A. M. Ginting, 2015).

Terdapat hubungan antara isu kemiskinan dengan kemampuan sebagian penduduk yang masih rendah dalam mencapai kehidupan yang layak, sehingga harapannya seluruh pihak mampu menyumbangkan peran aktif sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang sifatnya produktif dan berorientasi untuk memperbaiki pendapatan keluarga miskin (Adnan & Amri, 2020). Salah satu pihak yang diharapkan mampu menyumbangkan peran aktif untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya kesejahteraan keluarga adalah perempuan. Penelitian lain yang dilakukan di Ghana menunjukkan bahwa perempuan yang berpartisipasi pada kegiatan ekonomi produktif mampu membuat kesejahteraan keluarga meningkat dan secara agregat mampu menekan angka kemiskinan (Owusu & Anyesepari, 2013). Akan tetapi, kondisi yang bertolak belakang justru terjadi di mana penduduk miskin di dunia didominasi oleh kaum perempuan (Todaro & Smith, 2006). Selaras dengan pendapat tersebut, data BPS menunjukkan bahwa dalam rentang waktu lima tahun terakhir, sejak 2017 hingga 2021, perempuan selalu mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Bahkan angka kemiskinan

perempuan mencapai 10,37 persen sedangkan angka kemiskinan laki-laki bernilai 9,92 persen pada tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi dan peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan masih terbatas karena perempuan masih mendominasi dibandingkan laki-laki dalam hal kemiskinan.

Berdasarkan fenomena di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah kemiskinan berkaitan erat dengan ketidaksetaraan, dalam hal ini ketidaksetaraan gender (Mahoozi, 2015). Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Satu di antara hal yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang responsif gender. Hal tersebut menjadi penting karena pengalaman antara perempuan dan laki-laki dalam hal kemiskinan berbeda, serta perempuan jauh lebih tertinggal dari laki-laki, khususnya dalam hal akses ekonomi dan politik (Noerdin et al., 2006). Istilah yang menjelaskan suatu keadaan di mana kemiskinan perempuan lebih tinggi dari kemiskinan laki-laki adalah feminisasi kemiskinan. Feminisasi kemiskinan dapat diminimalkan dengan pendekatan pemberdayaan perempuan dan pencapaian kesetaraan gender (Pancawati et al., 2019).



Gambar 3. Perkembangan IPM Menurut Jenis Kelamin dan IPG di Indonesia, 2017 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada Gambar 3, diketahui bahwa ukuran kesetaraan gender di Indonesia yang diwakili oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren positif sejak tahun 2017 hingga 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan potensi perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (KemenPPPA, 2020). Namun, pembangunan perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga menunjukkan bahwa belum sepenuhnya tercapai kesetaraan dalam pembangunan. Dengan demikian, seharusnya peran perempuan dapat lebih dimaksimalkan agar dapat setara dengan laki-laki karena kesetaraan tersebut akan

berdampak baik pada peningkatan indeks pembangunan dan bisa berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan sumber daya yang menyeluruh (Azhari, 2019). *Women Research Institue* (2006) menyebutkan bahwa jika perempuan tidak menjadi target dari pengurangan kemiskinan dan tidak diterapkan analisis gender untuk mempelajari akar permasalahan kemiskinan, kebijakan yang diupayakan tidak dapat menjangkau perempuan yang aksesnya cenderung terbatas di ruang publik. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan menganalisis pengaruh variabel-variabel dari sudut pandang peran perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2017-2021, agar nantinya dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Konsep dan definisi kemiskinan banyak dideskripsikan oleh para ahli dalam berbagai sudut pandang. Todaro & Smith (2006) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat diukur menggunakan dua cara, baik menggunakan atau tidak menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*) sebagai acuan. Kemiskinan absolut merupakan konsep kemiskinan yang menggunakan garis kemiskinan sebagai acuan, sedangkan kemiskinan relatif merupakan konsep yang tidak menggunakan garis kemiskinan sebagai acuan. Sementara itu, BPS menjelaskan konsep kemiskinan sebagai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Pendekatan ini mengacu pada kemiskinan yang dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2022).

Penyebab Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan yang hingga saat ini masih terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Haughton & Khandker (2009) menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang menyebabkan kemiskinan, salah satunya adalah karakteristik rumah tangga. Karakteristik yang menyebabkan rumah tangga menjadi miskin adalah demografi, ekonomi, dan sosial. Amartya Sen (2003) mengemukakan bahwa tidak hanya ketiadaan materi yang menyebabkan kemiskinan, tetapi juga keterbatasan dalam memperoleh kapabilitas yang diperlukan untuk hidup layak. Dalam teori ini, kapabilitas diartikan sebagai kemampuan atau potensi individu untuk melakukan aktivitas penting dalam kehidupan, seperti memperoleh akses pada pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau terlibat dalam kehidupan politik.

Pendidikan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang secara sadar dan terencana dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Terdapat peran penting pendidikan dalam upaya mengurangi kemiskinan serta mencapai pembangunan berkelanjutan karena pendidikan yang bermutu akan searah dengan kesejahteraan masyarakat (UNESCO, 2015). Sen (2003) juga menegaskan bahwa pendidikan membuka pintu akses ke berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Bagi perempuan, pendidikan dapat meningkatkan produktivitas serta kemampuan ekonomi keluarga sehingga mampu mengurangi kemiskinan (Barro et al., 2013).

Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan aset berharga bagi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat (WHO, 1948). Sementara itu, Huber et al., (2011) menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan yang positif dalam hal fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekadar ketiadaan kecacatan atau penyakit. Terdapat keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan, di mana terdapat hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara keduanya. Ketika seseorang mengalami masalah kesehatan, tentunya dapat menghambat produktivitas mereka dan mengurangi peluang untuk keluar dari kondisi kemiskinan (Wagstaff, 2002). Secara khusus, kesehatan perempuan juga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Ketika perempuan memiliki kesehatan yang baik, sangat memungkinkan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam angkatan kerja sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi risiko kemiskinan (WHO, 2019).

Demografi

Harli (2015) mendefinisikan bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari penduduk di suatu wilayah berdasarkan beberapa karakteristik, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Adapun karakteristik demografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, khususnya jenis kelamin kepala rumah tangga (KRT), dalam hal ini KRT perempuan. Perempuan sebagai KRT didefinisikan sebagai perempuan yang memikul tanggung jawab tunggal untuk membiayai kehidupan keluarganya (Mosses, 2007). Sebagian besar KRT perempuan berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah (Ernawati, 2013). Menurut Putri (2019), secara umum gender dan kemiskinan memiliki hubungan dan rumah tangga yang dikepalai oleh KRT perempuan dianggap mengalami kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh KRT laki-laki.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah adanya diskriminasi gender, kesenjangan upah, dan keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi (Klasen & Lamanna, 2009).

Ekonomi

Ekonomi merupakan bidang studi yang fokus membahas mengenai cara masyarakat ketika mengelola sumber daya yang langka (Mankiw, 2019). Sejalan dengan definisi tersebut, Lipsey (1984) menjelaskan bahwa ekonomi adalah bidang ilmu yang mengkaji berbagai strategi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas dan langka, dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kondisi ekonomi yang semakin baik dapat ditunjukkan melalui tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduknya dan hal tersebut dapat dilihat melalui besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan (BPS, 2021). Secara umum, terdapat hubungan antara pengeluaran per kapita yang tinggi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Ketika terjadi peningkatan dalam hal pendapatan dan pengeluaran individu/keluarga, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik dalam hal mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini memiliki efek positif untuk mengurangi sejumlah orang yang masih hidup dalam kemiskinan (Banerjee et al., 2011).

Ketenagakerjaan

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 1, ketenagakerjaan merupakan berbagai hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada rentang waktu sebelum, selama, ataupun setelah masa kerja habis. Sementara itu, *International Labour Organization* (ILO) menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah berbagai cara seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan hak-hak serta kewajiban mereka sebagai seorang pekerja disebut dengan ketenagakerjaan. Salah satu instrumen penting untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di dalamnya penurunan angka kemiskinan adalah ketenagakerjaan dan lapangan kerja yang tersedia (Kurniasih et al., 2022). Hal tersebut dikarenakan ketika akses lapangan kerja meningkat akan berdampak pada meningkatnya pendapatan para pekerja yang nantinya dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.

Metode Penelitian

Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin (MISKIN) sebagai variabel terikat. Selanjutnya, menggunakan variabel dari aspek pendidikan, kesehatan, demografi, ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai variabel bebas.

Persentase Penduduk Miskin (MISKIN)

Persentase penduduk miskin (*Head Count Index/P0*) adalah persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita kurang dari garis kemiskinan setiap bulannya.

Pendidikan

Aspek pendidikan dalam penelitian ini diproksikan ke Angka Partisipasi Murni SD/ sederajat Perempuan (APMSDP) dan Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP).

- APM SD/ sederajat perempuan adalah persentase perempuan usia sekolah dasar (7 – 12 tahun) yang sedang mendapatkan pendidikan pada tingkat tersebut dibandingkan dengan jumlah total perempuan dalam kelompok usia yang sama.
- AMH perempuan adalah rasio perempuan berusia 15 tahun ke atas yang memiliki keterampilan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa perlu memahami apa yang ditulis terhadap jumlah perempuan berusia 15 tahun ke atas.

Kesehatan

Aspek kesehatan dalam penelitian ini diproksikan ke Angka Harapan Hidup Perempuan (AHHP). AHH perempuan adalah rata-rata tahun hidup hidup seorang perempuan setelah mencapai usia x pada tahun tertentu, dengan mempertimbangkan tingkat kematian yang berlaku di lingkungannya.

Demografi

Aspek demografi dalam penelitian ini diwakili oleh jenis kelamin khususnya jenis kelamin dari kepala rumah tangga yang didekati dengan data persentase rumah tangga dengan KRT perempuan (RUTAP). Persentase rumah tangga dengan KRT perempuan adalah jumlah rumah tangga dengan jenis kelamin KRT perempuan per total rumah tangga di suatu wilayah.

Ekonomi

Aspek ekonomi dalam penelitian ini diproksikan ke pengeluaran per kapita perempuan yang disesuaikan (PPKP). Pengeluaran per kapita perempuan yang disesuaikan dapat didefinisikan sebagai pengeluaran konsumsi seluruh anggota rumah tangga perempuan dalam satu bulan per jumlah anggota rumah tangga perempuan dan telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan dalam penelitian ini diproksikan ke rata-rata upah perempuan (UPAHP), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), dan Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan (TPTP).

- Rata-rata upah perempuan adalah imbalan bagi buruh/karyawan perempuan yang diterima setiap bulan, perusahaan/kantor/majikan dapat membayar imbalan tersebut dalam bentuk uang atau barang, imbalan tersebut sudah dikurangi dengan iuran wajib, pajak, penghasilan, dan sebagainya.
- TPAK perempuan adalah persentase penduduk perempuan yang termasuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas di suatu wilayah.
- TPT perempuan adalah jumlah pengangguran perempuan per jumlah angkatan kerja perempuan yang dinyatakan dalam persen.

Jenis dan Sumber Data

Data pada penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik dan data tersebut merupakan data panel yang terdiri atas data runtun waktu dengan interval tahunan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dan data individu yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. Adapun variabel terikat yang digunakan adalah persentase penduduk miskin (MISKIN). Sementara itu, variabel bebas yang digunakan terdiri atas Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat Perempuan (APMSDP), Angka Melek Huruf Perempuan (AMHP), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHHP), Persentase Rumah Tangga dengan KRT Perempuan (RUTAP), Pengeluaran per Kapita Perempuan yang Disesuaikan (PPKP), Rata-rata Upah Perempuan (UPAHP), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP), dan Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan (TPTP).

Metode Analisis

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis regresi data panel yang dalam pengolahannya dibantu dengan perangkat lunak berupa Microsoft Excel 2019 dan *Eviews 12*. Berikut adalah bentuk umum dari spesifikasi model regresi data panel untuk penelitian ini.

$$\text{MISKIN}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{APMSDP}_{it} + \beta_2 \text{AMHP}_{it} + \beta_3 \text{AHHP}_{it} + \beta_4 \text{RUTAP}_{it} + \beta_5 \text{LnPPKP}_{it} + \beta_6 \text{LnUPAHP}_{it} + \beta_7 \text{TPAKP}_{it} + \beta_8 \text{TPTP}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

keterangan:

Ln	=	logaritma natural
MISKIN	=	tingkat kemiskinan
APMSDP	=	APM SD/ sederajat perempuan
AMHP	=	AMH perempuan
AHHP	=	AHH perempuan
RUTAP	=	persentase rumah tangga dengan KRT perempuan
PPKP	=	pengeluaran per kapita perempuan yang disesuaikan
UPAHP	=	rata-rata upah perempuan
TPAKP	=	TPAK perempuan

- TPTP = TPT perempuan
- β_0 = intersep
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_8$ = koefisien variabel bebas
- ε = komponen *error*
- i = provinsi (Aceh, Sumatera Utara, ..., Papua)
- t = tahun (2017, 2018, ..., 2021)

Analisis regresi data panel dimulai dengan pembentukan tiga model estimasi, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Setelah itu, melakukan pemilihan model terbaik melalui tiga uji, yaitu uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji BP-LM. Apabila model yang terpilih *fixed effect model* perlu dilakukan uji struktur matriks varians-kovarians residual untuk menentukan metode estimasi yang tepat. Setelah didapatkan model dan metode estimasi terbaik, dilakukan uji asumsi klasik dan uji keberartian model berupa pengecekan koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial. Tahapan terakhir adalah interpretasi model penelitian dengan menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Setelah melewati beberapa prosedur pengujian, didapatkan bahwa model terbaik untuk penelitian ini adalah *fixed effect model* dan menggunakan metode estimasi *Feasible Generalized Least Square* dengan *cross-section* SUR atau FGLS-SUR. Hal ini dikarenakan struktur matriks varians-kovarians residual dari model yang terpilih bersifat heteroskedastis dan terdapat *cross-sectional correlation*. Berikut adalah ringkasan hasil estimasi model.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Estimasi

Variabel	Koefisien	t-statistik	t-tabel	Ringkasan Statistik	
C	107,284*	16,913	1,657	<i>R-Squared</i>	0,9991
APMSDP	-0,068*	-1,668	-1,657	<i>Adjusted R-Squared</i>	0,9989
AMHP	-0,026	-0,832	-1,657	F-statistik	3611,569
AHHP	-0,632*	-9,153	-1,657	<i>P-value</i>	0,000
RUTAP	-0,138*	-8,159	1,657		
LnPPKP	-2,882*	-3,515	-1,657		
LnUPAHP	-0,914*	-2,820	-1,657		
TPAKP	-0,026*	-4,136	-1,657		
TPTP	0,122*	8,536	1,657		

Keterangan: * signifikan pada taraf signifikansi 5 persen.

Berikut adalah hasil estimasi persamaan regresi data panel berdasarkan ringkasan hasil pada Tabel 1.

$$\begin{aligned} \widehat{MISKIN}_{it} = & (107,284 + \hat{\mu}_i) - 0,068 APMSDP_{it}^* - 0,026 AMHP_{it} - 0,632 AHHP_{it}^* \\ & - 0,138 RUTAP_{it}^* - 2,882 LnPPKP_{it}^* - 0,914 LnUPAHP_{it}^* \\ & - 0,026 TPAKP_{it}^* + 0,122 TPTP_{it}^* \end{aligned} \quad (2)$$

Nilai *adjusted R*² yang diperoleh sebesar 0,9989. Nilai tersebut mencerminkan bahwa sebanyak 99,89 persen variasi dari tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh delapan variabel bebas, sedangkan 0,11 persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, berdasarkan uji simultan dengan uji F, diperoleh kesimpulan bahwa pada taraf signifikansi 5 persen, terdapat minimal satu variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, berdasarkan uji parsial dengan uji t, diperoleh kesimpulan bahwa pada taraf signifikansi 5 persen, variabel APM SD perempuan, AHH perempuan, persentase rumah tangga dengan KRT perempuan, pengeluaran per kapita perempuan, rata-rata upah perempuan, dan TPAK perempuan secara parsial signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel TPT perempuan signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, variabel AMH perempuan tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, untuk interpretasi model, pada model tersebut terdapat dua variabel yang di transformasi menggunakan linear-logaritma. Oleh karena itu, untuk interpretasinya, koefisien hasil estimasi perlu dikalikan dengan 0,01 atau secara matematis dapat dituliskan dengan $\frac{\beta_k}{100}$ pada variabel yang ditransformasi (Gujarati, 2003).

Pengaruh APM SD Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel APM SD perempuan signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5 persen. Koefisien sebesar -0,068 menunjukkan bahwa peningkatan APM SD perempuan sebesar satu persen dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,068 persen. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Asnawi (2019) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara APM SD dengan persentase penduduk miskin. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan, khususnya pendidikan dasar berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pendidikan dasar merupakan pendidikan awal yang penting bagi pembentukan seseorang sebagai dasar pengembangan kemampuan untuk jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi (Maizunati, 2018).

Pengaruh AMH Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel AMH perempuan tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5 persen. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Anggadini (2015) yang menyatakan bahwa untuk keluar dari permasalahan kemiskinan, tidak

akan cukup jika orang tersebut hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis saja. Kemampuan tersebut harus diikuti dengan kemampuan dan keterampilan lain agar dapat meningkatkan produktivitasnya. Tingkat produktivitas yang tinggi akan membantu dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk terbebas dari kemiskinan.

Pengaruh AHH Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel AHH perempuan signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5 persen. Koefisien sebesar -0,632 artinya peningkatan satu tahun pada AHH perempuan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,632 persen. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Anggadini (2015) dan Fikri & Suparyati (2017). Semakin tinggi AHH perempuan menunjukkan bahwa status kesehatan masyarakat di suatu wilayah semakin baik, hal ini juga mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang akan meningkatkan peluang angkatan kerja di suatu wilayah sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut (A. L. Ginting, 2020).

Pengaruh Persentase Rumah Tangga dengan KRT Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel persentase rumah tangga dengan KRT perempuan signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5 persen. Koefisien sebesar -0,138 menunjukkan bahwa peningkatan satu persen pada persentase rumah tangga dengan KRT perempuan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,138 persen. Pada penelitian ini, pengaruh variabel persentase rumah tangga dengan KRT perempuan terhadap tingkat kemiskinan berbeda dengan hipotesis penelitian yang ditentukan sebelumnya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Hidayat & Amar (2020) yang menyimpulkan bahwa ketika rumah tangga dikepalai oleh KRT perempuan, kemungkinan untuk mengalami kemiskinan cenderung lebih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh semakin mudahnya akses yang dinikmati oleh perempuan khususnya untuk memperoleh pendidikan, di mana ketika perempuan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kemungkinan mereka untuk memperoleh pendapatan yang layak dari pekerjaan yang dijalannya akan semakin tinggi sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya (Sihombing & Rahani, 2021). Selain itu, pendidikan yang tinggi bagi seorang KRT perempuan dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas kerjanya melalui keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan (Utomo & Rahani, 2013). Dengan demikian, keluarga yang dipimpinnya akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk terperangkap dalam masalah kemiskinan.

Pengaruh Pengeluaran per Kapita Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel pengeluaran per kapita perempuan signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5 persen. Koefisien sebesar -2,882 artinya setiap peningkatan seribu rupiah pada pengeluaran per kapita perempuan yang disesuaikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,029 persen. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Wulandari & Pratama (2022), di mana pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pengeluaran per kapita merupakan satu dari tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu untuk dimensi standar hidup layak yang memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan seseorang sebagai bentuk keuntungan dari keadaan perekonomian yang semakin baik (Ningtias & Anwar, 2021). Semakin tinggi pengeluaran per kapita, mengindikasikan bahwa kehidupan orang tersebut semakin sejahtera dan semakin jauh dari permasalahan kemiskinan.

Pengaruh Rata-rata Upah Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel rata-rata upah perempuan signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5 persen. Koefisien sebesar -0,914 menunjukkan bahwa peningkatan satu rupiah pada rata-rata upah perempuan dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,009 persen. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iksan & Arka (2022). Ketika upah yang diterima oleh perempuan semakin tinggi, tentunya akan bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, meningkatkan derajat serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat agar dapat keluar dari masalah kemiskinan. Namun, kenyataannya perempuan menerima upah yang nominalnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan perempuan masih bekerja di sektor informal dan belum mendapatkan perlindungan sosial yang cukup. Akibatnya, perempuan sangat rentan untuk mendapatkan pelanggaran hukum di tempat bekerja, yaitu berupa kekerasan fisik, diskriminasi, eksploitasi, dan yang paling buruk adalah perdagangan manusia (Zuhdi, 2018).

Pengaruh TPAK Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel TPAK perempuan signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5 persen. Koefisien sebesar -0,026 artinya setiap peningkatan TPAK perempuan sebesar satu persen dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,026 persen. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniasih et al., (2022), di mana terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara partisipasi perempuan dalam angkatan kerja terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi TPAK perempuan menunjukkan bahwa perempuan usia angkatan kerja memiliki kesempatan kerja yang semakin besar sehingga dapat meningkatkan jumlah perempuan yang bekerja dengan produktif dan hal tersebut bisa berdampak

pada peningkatan perekonomian melalui peningkatan pendapatan yang nantinya akan berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan (Kurniasih et al., 2022).

Pengaruh TPT Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel TPT perempuan signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5 persen. Koefisien sebesar 0,122 menunjukkan bahwa setiap peningkatan TPT perempuan sebesar satu persen dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 0,122 persen. Hasil penelitian sejalan dengan hasil yang dikemukakan oleh Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) tersebut, yakni terdapat hubungan yang searah antara pengangguran dan tingkat kemiskinan. Pengangguran erat kaitannya dengan tingkat pendapatan seseorang, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sukirno (2015) bahwa terdapat efek buruk dari pengangguran, yakni bisa mengurangi pendapatan yang diperoleh masyarakat sehingga bisa mengurangi tingkat kesejahteraannya. Ketika tingkat kesejahteraan seseorang rendah, peluang orang tersebut untuk keluar dari masalah kemiskinan akan semakin rendah karena tidak memiliki pendapatan.

Tabel 2. Efek Individu

Provinsi	Efek	Provinsi	Efek
Aceh	5,386	Nusa Tenggara Barat	2,879
Sumatera Utara	-1,801	Nusa Tenggara Timur	8,786
Sumatera Barat	-3,441	Kalimantan Barat	-4,026
Riau	-3,486	Kalimantan Tengah	-6,028
Jambi	-2,825	Kalimantan Selatan	-6,082
Sumatera Selatan	2,033	Kalimantan Timur	-2,812
Bengkulu	4,151	Kalimantan Utara	-3,860
Lampung	1,965	Sulawesi Utara	-1,573
Kep. Bangka Belitung	-5,703	Sulawesi Tengah	1,266
Kepulauan Riau	-3,535	Sulawesi Selatan	-0,578
DKI Jakarta	-1,946	Sulawesi Tenggara	1,871
Jawa Barat	-1,270	Gorontalo	3,030
Jawa Tengah	4,492	Sulawesi Barat	-3,567
DI Yogyakarta	7,167	Maluku	4,084
Jawa Timur	2,122	Maluku Utara	-6,108
Banten	-4,548	Papua Barat	7,570
Bali	-3,811	Papua	10,198

Efek Individu

Pada *fixed effect model*, setiap amatan dalam hal ini adalah provinsi memiliki efek individu yang berbeda. Efek individu tersebut menggambarkan perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia dengan asumsi variabel bebas bernilai konstan. Perbedaan efek individu disebabkan oleh perbedaan karakteristik setiap provinsi di Indonesia. Tabel 2 berisi efek individu dari seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Maluku Utara memiliki efek individu terendah di Indonesia yaitu sebesar -6,1076. Hal

ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki tingkat kemiskinan terendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia dengan asumsi seluruh variabel bebas bernilai konstan. Sementara itu, provinsi dengan efek individu tertinggi adalah Provinsi Papua yaitu sebesar 10,1984. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dibandingkan provinsi lainnya dengan asumsi seluruh variabel bebas bernilai konstan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh peran perempuan yang diukur melalui beberapa variabel menunjukkan bahwa APM SD perempuan, AHH perempuan, persentase rumah tangga dengan KRT perempuan, pengeluaran per kapita perempuan yang disesuaikan, rata-rata upah perempuan, dan TPAK perempuan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel TPT perempuan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, variabel AMH perempuan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan khususnya kepada pemerintah adalah pemerintah diharapkan mampu menerapkan kebijakan yang responsif gender agar dapat memaksimalkan peran perempuan di dalamnya sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan akses perempuan dalam hal pendidikan, kesehatan, demografi, ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Referensi

- Adnan, G., & Amri, K. (2020). Apakah pendapatan perempuan dapat mengurangi kemiskinan? Bukti data panel di Indonesia. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8(1), 64. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v8i1.1235>
- Amalia, A. (2017). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan gender terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. *At-Tawassuth*, 3(3), 324–344.
- Anggadini, F. (2015). Analisis pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, tingkat pengangguran terbuka, dan pendapatan domestik regional bruto terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2013. *E-Jurnal Katalogis*, 3(7), 40–49.
- Asnawi, Abd. R. (2019). Pengaruh pendidikan terhadap persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2017. *SKRIPSI*.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). Profil perempuan Indonesia 2019. Profil perempuan Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/b4bdc-profil-perempuan-indonesial-2019.pdf>

- Barro, R. J., Caselli, F., & Lee, J. W. (2013). Symposium on human capital and economic development: An introduction. *Journal of Development Economics*, 104, 181–183. <https://doi.org/10.1016/J.JDEVECO.2013.05.003>
- Emil, G., & Verizon, S. (2013). Women live longer than men. *Bratislava Medical Journal*, 114(2), 45–49. https://doi.org/10.4149/BLL_2013_011
- Fikri, R. O., & Suparyati, A. (2017). Pengaruh pendidikan, kesehatan dan gender terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Media Ekonomi*, 25(1), 43–56. <https://doi.org/10.25105/me.v25i1.5203>
- Ginting, A. L. (2020). Dampak angka harapan hidup dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 42–61. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13197>
- Ginting, A. M. (2015). Pengaruh ketimpangan pembangunan antarwilayah terhadap kemiskinan di Indonesia 2004 - 2013. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi*, 20(1), 45–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v20i1.569>
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometrics*. McGraw Hill.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on poverty and inequality*.
- Hidayat, R., & Amar, S. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 25–30.
- Huber, M., André Knottnerus, J., Green, L., Van Der Horst, H., Jadad, A. R., Kromhout, D., Leonard, B., Lorig, K., Loureiro, M. I., Van Der Meer, J. W. M., Schnabel, P., Smith, R., Van Weel, C., & Smid, H. (2011). How should we define health? *BMJ (Online)*, 343(7817). <https://doi.org/10.1136/bmj.d4163>
- Iksan, M., & Arka, S. (2022). Pengaruh upah, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja serta kemiskinan Provinsi Jabar Bagian Selatan. *E-Jurnal EP Unud*, 11(1), 147–175.
- Incung, V., Hardianto, W. T., & Rusmiwari, S. (2013). Kesenjangan gender (perempuan) dalam mendapatkan pendidikan pada masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 38–40
- Institute, W. R. (2006). Potret kemiskinan perempuan. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Kurniasih, C. E., Tampubolon, D., & Ula, T. (2022). Analisis pengaruh indikator pasar tenaga kerja perempuan terhadap kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. *UM Jember Proceeding Series*, 1(4), 572–584.
- Mahoozi, Hosnieh. (2015). Gender and spatial disparity of multidimensional poverty in Iran. OPHI Working Paper.
- Maizunati, N. A. (2018). Optimalisasi peran pendidikan dasar dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Klaten. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 3(2).

- Owusu, J., Akanbasiam, A. C., & Anyesepari, A. A. (2013). Microfinance schemes and poverty reduction among women in the Northern Region of Ghana. *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 3 No. 19.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Prawoto, N. (2009). Karakter kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(April), 56–68. <https://media.neliti.com/media/publications/30659-ID-memahami-kemiskinan-dan-strategi-penanggulangannya.pdf>
- Sen, A. (2003). Amartya Sen: Capability and well-being. In *The Quality of Life* (pp. 62–66). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0198287976.003.0005>
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan anak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4, 1–11.
- Sihombing, P. R., & Rahani, R. (2021). Faktor yang memengaruhi kesejahteraan rumah tangga yang dipimpin perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 225–232. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.225-232.2021>
- Suharianto, J., & Lubis, H. R. (2022). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. *Niagaawan*, 11(2), 168. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i2.35113>
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi teori pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the impact of Covid-19 on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 0(0), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Susiana, S. (2017). Perlindungan hak pekerja perempuan dalam perspektif feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 207–222.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan ekonomi*. Edisi ke 9. Erlangga.
- Wulandari, I., & Pratama, A. A. N. (2022). Analisis pengaruh dana ZIS (zakat, infak, sedekah), pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Periode 2010-2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3301–3309.
- Zuhdi, S. (2018). Membincang peran ganda perempuan dalam masyarakat industri. *Jurnal Hukum Jurisprudence*, 8(2), 81–86.